

## A. Latar Belakang

Pengawasan pada dasarnya merupakan batasan karakteristik dari perintis atau organisasi puncak dalam setiap hubungan, sesuai dengan kapasitas fundamental organisasi lainnya, terutama persiapan dan pelaksanaan. Apalagi dalam organisasi pemerintahan, kemampuan pengawasan merupakan kewajiban seorang kepala pemerintahan.<sup>1</sup> Pada umumnya, pengawasan dilakukan oleh pemimpin instansi atau perwakilan yang lebih siap daripada pekerja yang menjadi bawahan, bukan hanya karena pelaksanaan pekerjaan dipusatkan pada upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimanapun, yang lebih kritis adalah cara bawahan dapat melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang tepat tanpa mengabaikan standar dalam organisasi. Pengawasan sebagai salah satu kemampuan manajemen sudah cukup lama diterapkan, baik di organisasi pemerintahan maupun instansi swasta, yang menjadikan rahasia dalam mengembangkan disiplin kerja lebih lanjut. Pengawasan juga dapat lebih mengembangkan eksekusi representatif. Disiplin juga

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Dan Heri Kusmanto, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 No.1 (2016) 75-86

merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam suatu organisasi.<sup>2</sup>

Meningkatkan efektivitas dan produktivitas pelaksanaan pekerjaan adalah sesuatu yang vital dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan organisasi khususnya organisasi pemerintah. Efektivitas mengacu pada bagaimana pekerjaan dilakukan apakah sesuai dengan strategi atau metode yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu, pelaksanaan pekerjaan yang kuat akan benar-benar ingin memberikan pemahaman tentang pengaturan yang ditentukan sebelumnya. Selain itu, efektivitas diharapkan dapat membatasi biaya pelaksanaan dan waktu untuk menyelesaikan kegiatan, kecukupan dan kemahiran dalam pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan manajemen merupakan salah satu jenis strategi dalam bidang pengawasan. Eksekusi strategi adalah komponen utama untuk hasil suatu pengaturan, tanpa eksekusi pendekatan publik mungkin hanya dokumentasi sederhana. Terlebih lagi, hal-hal lain yang penting dalam melaksanakan pengaturan yang telah diambil dan dilakukan sesuai dengan tujuan pendekatan.<sup>3</sup>

Perubahan kerangka kewenangan publik dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong kebutuhan untuk peningkatan administrasi dan tanggung jawab pengelolaan, sehingga pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan semua urusan pemerintah di luar pemerintahan pusat, pemberian otonomi

---

<sup>2</sup> Baihaqi, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Perpustakaan. LIBRIA Vol. 8 No. 1 (2016) 129-142

<sup>3</sup> Sumarsono, Sony, Manajemen Keuangan Pemerintah (2005) Graha Ilmu , Jakarta

daerah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik yang ada di Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, oleh karena itu otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses perbaikan atau proses pembangunan.

Di Indonesia, istilah sektor publik semakin dikenal sejak adanya reorganisasi kerangka waktu di bidang pemerintahan dan administrasi keuangan negara dan daerah. Negara dan daerah adalah organisasi sektor publik yang bertindak sebagai wadah untuk perubahan yang dapat dianggap sebagai entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumberdaya ekonomi yang tidak sedikit, bisa dianggap sangat besar, pertukaran ekonomi dan keuangan lengkap namun alasan penyelenggaraannya tidak terlalu untuk kepentingan, dimiliki secara kolektif oleh publik pada umumnya setiap pelaksanaan kewajiban dan kemampuannya senantiasa dilandasi oleh peraturan atau pedoman yang baik. Dalam jangka waktu yang sangat singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini ada perhatian yang luar biasa tentang pelatihan pembukuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. Dengan asumsi kita melihat lebih hati-hati pada kualitas asosiasi area publik atau organisasi sektor publik, realitas mereka wajib untuk

menawarkan jenis bantuan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menciptakan pelayanan masyarakat yang baik pastinya dibutuhkan biaya yang diperlukan, artinya dibutuhkan biaya pengeluaran karena adanya aktivitas pelayanan tersebut. Sumber daya atau aturan penggunaan yang diawasi harus diwakili dengan menggunakan model pertanggungjawaban yang memiliki pedoman pencatatan yang sama, yaitu standar akuntansi pemerintah. Sektor publik adalah administrasi keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Akibatnya, administrasinya membutuhkan penerimaan, keterbukaan dan tanggung jawab kepada orang-orang pada umumnya. Dalam pemerintah sendiri sudah mulai ada kebutuhan untuk lebih mengembangkan terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi pertanggung jawaban, sistem akuntansi pengawasan dan pemeriksaan, serta strategi yang dilakukan pemerintah. Sesuai dengan bidang keuangan yang tidak dapat disangkal, tugas akuntansi pertanggungjawaban semakin diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan pembukuan, sebagai alat untuk pengendalian biaya, dan pelaksanaan penelitian kinerja melalui rencana pengeluaran yang sekarang dikenal sebagai kerangka pembukuan kewajiban, atau sistem akuntansi pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu kerangka yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan mengatur dan mengendalikan manajemen setiap perpindahan kegiatan pusat pertanggungjawaban. Mengingat pentingnya

pengendalian manajemen dalam pelaksanaan fungsional organisasi atau lembaga, akuntansi pertanggungjawaban menawarkan jenis perintah atas segmen atau cabang yang tidak dapat diatur secara langsung oleh perintis atau pemimpin. Kerangka akuntansi pertanggungjawaban penting untuk data yang diberikan oleh kantor yang harus melaporkan suatu tindakan yang diselesaikan baik dalam hal perbaikan atau masalah yang dialami. Dari laporan tersebut dilakukan estimasi dan peningkatan untuk mengetahui apakah tujuan yayasan atau organisasi dan rencana yang telah ditetapkan sudah dilakukan dengan tepat atau tidak.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban dalam instansi pemerintahan merupakan tanda komitmen untuk bertanggung jawab atas tercapai atau tidaknya pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Tanggung jawab pelaksanaan organisasi pemerintah yang dikembangkan lebih lanjut secara luas mempengaruhi bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, pengembangan lebih lanjut tanggung jawab pameran organisasi pemerintah akan benar-benar ingin bekerja secara adil dan kepercayaan publik terhadap otoritas publik, sedangkan di bidang keuangan, pengembangan lebih lanjut tanggung jawab presentasi organisasi pemerintah akan mendukung peningkatan spekulasi lingkungan. Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan kerangka keuangan daerah yang bertanggung jawab untuk mengawasi aset dengan kerangka desentralisasi secara lugas, produktif, sukses, dan bertanggung jawab. Data tentang penyajian tanggung jawab organisasi pemerintah diperlukan oleh otoritas publik dengan

---

<sup>4</sup> Anik khoirunisa dan anang subardjo, penilaian prestasi kerja sebagai alat pengendalian manajemen akuntansi pertanggungjawaban, riset akuntansi dan jurnal, vol. 5 no. 7 (2016) 1-12

alasan bahwa berdasarkan data tersebut otoritas publik memiliki bahan untuk mengejar pilihan untuk membuat peningkatan eksekutif dalam organisasi usaha pemerintah yang jauh lebih baik. Data ini diperlukan sebagai alasan perencanaan laporan pertanggungjawaban.

Akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting di dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntansi pemerintah berperan untuk membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Pengelolaan keuangan publik merupakan bentuk keajaiban dari pemerintah desa, daerah dan pusat. Salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintah yang penting yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sangat penting dalam penyusunan suatu laporan. Laporan yang tidak memiliki akuntabilitas maka diindikasikan laporan tersebut rekayasa. Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah bisa dilihat dan ditentukan dari wujud pengelolaan keuangan daerahnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil penyimpangan tersebut.

Pengawasan berarti mendayaguna perangkat negara dalam memberantas setiap misrepresentasi atau pemerasan dengan mengadakan pengawasan intern guna untuk menyaring presentasi pemerintah daerah atau para eksekutif untuk membuat administrasi yang hebat. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilengkapi dengan sarana administrasi di dalamnya, yang dilakukan atau diselesaikan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan perbaikan, sehingga sesuai dengan rencana dan pengaturan yang bersangkutan. Pengawasan ini berencana untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, persyaratan pengungkapan laporan keuangan di wilayah

otoritas publik, dan konsistensi dengan peraturan dan pedoman yang sesuai.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan memainkan peran penting terhadap kemajuan suatu daerah. Perkembangan kemandirian desa telah lama diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa telah dikonkretkan dengan membentuk undang-undang desa. Peraturan perundangan ini tercantum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang desa<sup>6</sup>. Besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan tanggung jawab yang sangat besar. Dana desa semestinya dapat digunakan untuk kepentingan bersama dan menyejahterakan masyarakat seluruhnya, sehingga, pengalokasian dan pertanggungjawaban perlu dilakukan pengawasan bersama dari semua pihak<sup>7</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengawasan fungsional pertanggungjawaban sektor publik dilakukan dalam upaya penilaian kinerja instansi pemerintahan desa.

## **C. Tujuan Penulisan Buku**

Untuk mengetahui Bagaimana pengawasan fungsional pertanggungjawaban sektor publik dilakukan dalam upaya penilaian kinerja instansi pemerintahan desa.

---

<sup>5</sup> Veni Marlina, Dan Subaeti, Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Bengkulu, Jurnal Ekonomi Unihaz, Vol. 1 No. 2 (2018) 39-49

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>7</sup> I Made Laut Mertha Jaya, Accounting Treatment In Village Public Sector Pelakuan Akuntansi Sektor Publik Desa, Gorontalo Accounting Jurnal, Vol. 2 No. 1 (2019)

#### **D. Manfaat Penulisan Buku**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian pengawasan pertanggungjawaban sektor publik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti sebagai solusi dalam pemecahan suatu masalah empiris yang didukung sehingga dapat memberikan pola pikir yang terstruktur dalam memecahkan suatu masalah terutama menyangkut pengawasan pertanggungjawaban sektor publik. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan organisasi, khususnya dalam instansi pemerintahan sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan pekerjaan guna menciptakan kinerja pemerintahan yang baik.

#### **E. Keterbaharuan**

Buku ini membahas mengenai pengawasan fungsional pertanggungjawaban sektor publik. Yang terfokus pada kinerja instansi pemerintahan desa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan gejala menyeluruh sesuai dengan situasi yang ada di lapangan melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Deskriptif merupakan data yang terkumpul yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan mendetail tentang peristiwa dan fenomena yang terjadi pada subyek dengan tujuan memperoleh gambaran yang lengkap tentang fenomena yang terjadi. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat sehingga dengan menggunakan metode ini peneliti

dapat menggambarkan secara jelas mengenai pengawasan fungsional pertanggungjawaban sektor publik